

Hendra Kurniawan
hendrayang7@gmail.com

Dosen
Pendidikan
Sejarah
Universitas
Sanata Dharma
Yogyakarta



Pancasila, Tionghoa, dan Bung Karno

Tanggal 1 Juni 1945 menjadi hari yang bersejarah. Pada tanggal tersebut Bung Karno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dalam pidato itu Bung Karno mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. Secara genealogis historis, 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Usul Bung Karno ini mendapat sambutan hangat dari para anggota BPUPKI.

Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang yang diketuai dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Anggota BPUPKI terdiri atas tokoh-tokoh organisasi politik, keagamaan, etnis, dan golongan. Kalangan etnis Tionghoa diwakili empat orang tokoh, yakni Liem Koen Hian, Oie Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoie, dan Tan Eng Hoa.

Dalam pidato 1 Juni 1945 itu Bung Karno mengungkapkan dasar *nationalstaat* sebagai satu kesatuan dari ujung Sumatra sampai Papua. *Nationalstaat* atau kebangsaan Indonesia ini bersifat bulat dan utuh.

Bukan lagi kebangsaan Jawa, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Selebes (Sulawesi), Bali, atau lainnya. Dasar kebangsaan Indonesia ini secara mufakat disetujui oleh semua anggota BPUPKI.

Para tokoh Tionghoa juga terlibat dalam pertarungan gagasan yang semakin mengukuhkan pemikiran ihwal Pancasila. Bung Karno menyadari ada orang-orang Tionghoa klasik penganut kosmopolitanisme yang kurang sepakat dengan dasar kebangsaan.

Kosmopolitanisme menganggap semuanya *menschheid*, perikemanusiaan menjadi yang utama dan tidak ada entitas kebangsaan. Ini berbeda dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia yang menyadari status dan masa depan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Ketika itu tampillah tokoh-tokoh Tionghoa nasionalis yang mengajak masyarakat Tionghoa untuk sepenuhnya mendukung perjuangan meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pemikiran ini muncul diawali semangat modernisasi Tiongkok atau nasionalisme Tiongkok yang dicetuskan dr. Sun Yat Sen.

Tumbuhnya Nasionalisme

Menjelang awal abad ke-20, bersamaan dengan kekalahan Tiongkok atas Jepang,

di Batavia berdiri Tionghoa Hwee Koan (THHK) yang membuka sekolah-sekolah Tionghoa. Berdirinya THHK disusul lahirnya berbagai surat kabar Tionghoa dalam bahasa Melayu Tionghoa.

Surat kabar itu seperti *Li Po* (1901) di Sukabumi, *Pewart Soerabaia* (1902) dan *Loen Boen* (1903) di Surabaya, *Djawa Tengah* (1909) di Semarang, serta *Sin Po* (1910) di Batavia. Ini semakin memperkuat rasa persatuan Tionghoa di Hindia Belanda.



mulai bangkit rasa nasionalisme Tionghoa. Hal ini memengaruhi kaum Hoakiau, termasuk masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Kali pertama muncul gerakan kaum muda Tionghoa atau Jong Chineseche Beweging. Gerakan ini memprotes aturan diskriminasi zona tempat tinggal Pecinan (*wijkenstelsel*) dan aturan surat jalan (*passenstelsel*) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Tionghoa.

Berikutnya pada 17 Maret 1900

belakang ini kemudian mendorong masyarakat Tionghoa mendukung gagasan kebangsaan Indonesia.

Semua Buat Semua

Bung Karno mengakui pemikirannya tentang kebangsaan terinspirasi pula dari dr. Sun Yat Sen. Tahun 1918, dr. Sun Yat Sen dalam tulisannya berjudul *San Min Cu I* atau *The Three People's Principles* menanggalkan pemikiran kosmopolitanisme.

San Min Cu I adalah tiga prinsip pokok rakyat atau Trisila, yakni *Min Chu* (nasionalisme), *Min Chuan* (demokrasi), dan *Min Seng* (keadilan sosial). Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada tokoh modernisasi Tiongkok itu.

Bung Karno menempatkan Tionghoa sebagai bagian dari sejarah berdirinya negara Indonesia. Banyak tokoh Tionghoa nasionalis yang berperan dalam upaya mencapai kemerdekaan.

Selanjutnya dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) juga terdapat perwakilan Tionghoa, yakni Drs. Yap Tjwan Bing yang ikut mengesahkan UUD 1945 (dasar Pancasila ada di dalamnya). Jejak *mentifact* dan *sociofact* ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara keberadaan masyarakat Tionghoa dengan Bung Karno dan Pancasila yang menjadi buah pikirnya.

Sadar akan bahaya nasionalisme yang berlebihan (*chauvinisme*) Bung Karno menegaskan bahwa *my nationalism is humanity*. Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang menyendiri. Selain itu dalam kebangsaan tersebut, berbagai perbedaan yang kodrati sebagai manusia (*sunatullah*) dihargai sebagai keniscayaan.

Bung Karno sejak awal telah menyatakan negara Indonesia yang berdiri saat ini didasarkan atas prinsip semua buat semua. Dengan Pancasila Indonesia ada bukan untuk kelompok agama, atau golongan tertentu namun Indonesia buat Indonesia!